

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi ini akan mengupas tentang upaya pemerintah Perancis untuk menanggulangi dampak terorisme di Perancis pasca penembakan di Kantor Majalah Charlie Hebdo.

Terorisme memang bukan merupakan sebuah isu yang baru dalam hubungan Internasional. Terorisme telah dikenal sejak berakhirnya perang dunia kedua dan perang dingin dimana terorisme tersebut telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tatanan politik internasional saat ini, baik itu aksi terorisme yang bersifat domestik maupun yang berskala internasional.¹ Dalam menjelaskan definisi “Terorisme”, beberapa pakar ilmu politik dan hubungan internasional mengemukakan beberapa definisi yang beragam. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan identifikasi tindakan, karakteristik maupun akar permasalahannya yang melatarbelakangi tindakan terorisme.

Dari segi bahasa istilah terorisme berkaitan dengan kata “terror” dan “teroris”. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketertanan di dalam kelompok masyarakat yang

¹ Agus Subagyo, Terorisme Dalam Hubungan Politik Internasional. diakses tanggal: 18 Agustus 2015
http://www.pikiran_rakyat.com

lebih luas, dari pada hanya jatuhnya korban kekerasan.² Sedangkan teroris berarti orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik.³ Dalam websitenya, *International Terrorism and Security Research* menjelaskan bahwa istilah “terorisme” berasal dari bahasa Perancis “le terreur” yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil revolusi Perancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang dituduh melakukan kegiatan pemerintahan.⁴

Perancis sendiri merupakan negara yang mempunyai toleransi tinggi terhadap kebebasan beragama bagi tiap individu dalam menjalankan ibadahnya. Dari total jumlah penduduk Perancis 63,8 juta, terdapat 83% - 88% penduduk beragama Katolik Roma, 2% penduduk beragama Protestan, 1% adalah Yahudi, 5% - 10% penduduk beragama Islam, sementara 4% lainnya agama yang tidak berafiliasi (Nation Master, 2006).

Perancis merupakan salah satu negara modern di Eropa yang paling menjunjung tinggi kebebasan beragama. Di Perancis, agama merupakan suatu kebebasan nurani dan kebebasan umum yang haknya dimiliki oleh setiap masyarakat. Pemerintahnya menjadikan Perancis menjadi sebuah negara yang sekuler dengan memisahkan persoalan politik dengan permasalahan agama

² A.M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009., Hal. 25.

³ Kamus Bahasa Indonesia Online. diakses pada tanggal 25 Agustus 2015
<http://kamusbahasaIndonesia.org/teroris/miripKamusBahasaIndonesia.org>

⁴ International Terrorism and Security Research, *Terrorism Research: Early History of Terrorism*. diakses pada: 8 Agustus 2015
<http://www.terrorism-research.com/history/early.php>

dimana negara tidak mencampurkan urusan politik dengan agama, atau lebih sederhananya agama merupakan urusan privat setiap individu. Demi melindungi kebebasan masyarakat, pemerintah menulis dengan tegas dan jelas kebebasan beragama dalam konstitusi.

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia universal, sebuah hak yang dijamin oleh undang-undang Republik Perancis. Kebebasan beragama berarti kebebasan bagi seseorang untuk menjalankan agamanya, tetapi juga berarti kewajiban untuk menghargai dan menghormati keyakinan filosofis orang lain. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, beragama, selama tidak mengganggu ketertiban umum yang ditetapkan oleh hukum. Memiliki hak dan kebebasan untuk berpendapat bukan berarti setiap individu dapat bebas menghina agama dan kepercayaan orang lain secara sengaja. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan menghormati hak dan nama baik agama orang lain. Hal seperti itu sungguh sangat dibutuhkan agar setiap agama dapat hidup berdampingan dengan aman, damai, dan tentram. Dimana Kebebasan menjalankan ibadah dijamin oleh undang-undang dasarnya dan dipertegas dalam sebuah deklarasi, yaitu *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara) seperti yang tertulis pada pasal 10 konstitusi Perancis, bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, bahwa dalam hal agama, selama tidak mengganggu ketertiban umum yang ditetapkan oleh hukum.⁵

⁵ Bimo, A.P. 2013. *Relasi Agama dan Pemerintah Perancis. Relasi Agama dan Pemerintahan di Perancis*. diakses 15 September 2014

Namun Perdamaian antar agama yang diikat erat oleh Perancis tidak terlepas dengan adanya serangkaian aksi terorisme yang dilatar belakangi oleh konflik agama, pada era 1985-2000an telah terjadi serangkaian aksi terorisme di Perancis yang melibatkan kelompok Islam radikal. Termasuk dalam rentan waktu ini adalah pengeboman di stasiun Saint-Michael yang menewaskan 8 orang dan menyebabkan 80 orang lainnya luka-luka, peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 Juli 1995.⁶

Aksi terorisme paling baru terjadi di Perancis adalah insiden penyerangan terhadap majalah Charlie Hebdo oleh kelompok Islam radikal Perancis, mereka marah atas majalah yang dikeluarkan oleh Charlie Hebdo disertai dengan karikatur Nabi Muhammad. Majalah Charlie Hebdo merupakan majalah kontroversi asal Perancis yang cenderung bersifat provokatif, yang kerap kali menyindir tokoh politikus, maupun agama.

Majalah Charlie Hebdo sendiri merupakan majalah yang unik., hanya kalangan tertentu yang bisa mengerti konten dari majalah tersebut. Namun dengan keunikan majalah tersebut, konten yang terkandung dalam bahasan tertentu cenderung kasar dan menyindir suatu lembaga, institusi maupun tokoh terkenal⁷. Kemudian majalah tersebut mengeluarkan edisi yang mengandung konten karikatur Nabi Muhammad.

http://bimoaryoprayudi-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-77630-Negara%20Agama%20dan%20Demokrasi-Relasi%20Agama%20dan%20Pemerintahan%20di%20Perancis.html

⁶ Charlie Hebdo attack: the worst terror attacks in Europe since 1995. diakses tanggal : 14 September 2015

<http://www.telegraph.co.uk>

⁷ Understanding Charlie Hebdo. diakses tanggal : 14 September 2015

<http://www.understandingcharliehebdo.com/>

Hal ini memicu banyak kemarahan masyarakat muslim di Perancis. Nabi Muhammad merupakan sosok yang sangat penting dalam Agama Islam. Beliau merupakan utusan Allah SWT. Wajah serta rupanya pun tak pernah ada yang mengetahui secara jelasnya, karena Allah SWT selalu menyembunyikan rupa asli Nabi Muhammad dengan maksud untuk menjaga nabi agar tidak dibuat atau ditiru bentuk wajahnya. Namun majalah Charlie Hebdo membuat karikatur Nabi Muhammad dengan menyelipkan isi tulisan yang terkesan menghina.

Tentu saja hal ini mengundang kemarahan masyarakat muslim di Perancis. Namun efek kemarahan umat Muslim di Perancis tentunya melahirkan beberapa tindakan yang berbeda dari setiap orang. Ada beberapa yang tidak melakukan tindakan, namun ada juga yang langsung membalas penghinaan ini, salah satunya dengan melakukan aksi terorisme. Serangan atau pembelaan dari kelompok Islam radikal dengan menembaki Kantor Majalah Charlie Hebdo pada tanggal 7 Januari 2015 dan menewaskan 12 orang.

Akibat penyerangan ini, pandangan masyarakat Perancis terhadap kaum muslim semakin tidak baik. Peristiwa ini juga menyebabkan Islamophobia di Perancis. Beberapa kelompok masyarakat non-muslim melakukan penyerangan balik terhadap umat muslim di Perancis. Terjadi penyerangan berupa pemboman, pembakaran tempat ibadah Islam. Seperti yang dikutip di surat kabar NBCnews,

The latest reported explosion erupted early Thursday near a mosque in the eastern French town of Villefranche-sur-Saône, about 250 miles from the French capital. The blast occurred at around 6 a.m. local time (midnight ET) and destroyed the glass front of a cafe attached to the building, Lyon-based newspaper Le Progres reported. Reuters quoted a police source confirming the explosion, and said the cafe was a kebab shop. "I'm worried

that this is tied to the dramatic events of Wednesday," Mayor Bernard Perrut told the newspaper"⁸

Fakta bahwa adanya penyerangan demi penyerangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat Perancis terhadap umat muslim Perancis pasca kejadian aksi penyerangan terorisme di Kantor Majalah Charlie Hebdo, membuktikan bahwa sebagian oknum masyarakat Perancis menyalahkan umat muslim atas kejadian penyerangan di Kantor Majalah Charlie Hebdo.

Penyerangan-penyerangan yang ditujukan kepada umat muslim di Perancis seperti pembakaran masjid di Perancis oleh beberapa oknum menyebabkan umat muslim di Perancis merasa tertekan. Tekanan demi tekanan yang didapatkan oleh umat muslim Perancis dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang kemudian nantinya akan digunakan sebagai alasan untuk melakukan aksi-aksi terorisme dengan mengatasnamakan umat muslim.

Hal ini terbukti dengan adanya serangkaian aksi terorisme pasca penembakan di Kantor Majalah Charlie Hebdo. Seperti kejadian aksi penyanderaan dan penembakan di Paris oleh Amedy Choulibaly, kemudian penusukan warga Perancis di Saint-Quentin Fallavier, dan puncaknya adalah peristiwa 13 November yang memakan korban hingga 137 orang.

⁸ Alexander, Smith. 2015. Attacks Reported At French Mosques in Wake of Charlie Hebdo Massacre, diakses pada tanggal : 12 september 2015
<http://www.nbcnews.com/storyline/paris-magazine-attack/explosion-reported-near-french-mosque-wake-charlie-hebdo-attack-n282051>

Berdasarkan kondisi ini, penulis ingin membahas tentang upaya pemerintah Perancis untuk menangani dampak dari aksi terorisme setelah peristiwa penyerangan Kantor Majalah Charlie hebdo.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Upaya Pemerintah Perancis dalam Menghadapi Dampak Terorisme Pasca Serangan di Kantor Majalah Charlie Hebdo” adalah agar dapat terpaparkan dengan lebih ilmiah tindakan serta keputusan yang di ambil oleh pemerintah Perancis dalam menanggulangi efek akibat serangan Kaum Islam Radikal di Kantor Majalah Charlie Hebdo.

Dengan adanya skripsi ini juga diharapkan dapat berguna sebagai media dalam penyampaian informasi kepada para pembacanya agar dapat memahami isu konflik yang terjadi di Perancis atas penyerangan Kantor Majalah Charlie Hebdo. Tujuan lain dari penulisan skripsi ini yaitu dimaksudkan sebagai media aplikasi teori yang pernah penulis dapatkan selama duduk di bangku kuliah. Serta memenuhi syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mudah mudahan dapat berguna bagi semua kalangan.

C. Pokok Permasalahan

Dalam penjelasan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah “Kebijakan apa yang di ambil oleh

pemerintah Perancis untuk mencegah meluasnya aksi terorisme pasca penyerangan Kantor Majalah Charlie Hebdo?”

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam menjawab pokok permasalahan yang ada, penulis akan menggunakan konsep teroris dan kontra-terorisme sebagai landasan pemikiran utama.

D.1 Teroris

Definisi teroris tidak kalah biasanya dengan istilah terorisme. Hal tersebut terjadi ketika harus disebut siapa mereka dan tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai terorisme. Menurut wictionary, teroris dapat disebut sebagai

A person, group, or organization that uses violent action, or the threat of violent action, to further political goals.⁹

Tentang pelaku terorisme, Tb. Ronny Rahman Nitibaskara berpendapat, bahwa pelaku dalam kejahatan ini dapat dibedakan antara individu dan organisasi, secara kualitatif, rage of terror (rasa takut yang mendalam akibat teror) yang disebar oleh pelaku individu tidak kalah menggetarakan dibandingkan dengan pelaku-pelaku yang terdiri dari kelompok terorganisir. Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (state terrorism). Terorisme negara, seperti terorisme pada umumnya, bersifat kontroversial, dan untuk itu tidak ada definisi yang diterima umum. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, bahwa yang dimaksud dengan state terrorism bukan

⁹ Terrorist, diakses pada 8 Agustus 2015
<https://en.wiktionary.org/wiki/terrorist>

berarti negara terlibat dalam terorisme secara langsung, melainkan hanya menjadi sponsor dari organisasi-organisasi tertentu pelaku terorisme. Untuk istilah ini saya lebih condong kepada pendapat yang lebih memberi ruang kepada terorisme yang dilakukan secara langsung oleh negara, dan sudah barang tentu pelaksanaannya adalah pemerintah. (Nitibaskara, 2002)

Menurut Ivan Hadar teroris dapat dibagi menjadi empat katagori, yaitu: ¹⁰

1. Pertama, tipe revolusioner, yaitu kelompok non-negara yang berupaya melawan atau mengubah negara-bangsa, undang-undang dasar, atau menggulingkan pemerintah berkuasa.
2. Kedua, tipe negara, yakni aneka tindakan pemerintah resmi untuk meneror masyarakatnya sendiri. Caranya, menggunakan death squads sebagai bagian polisi rahasia dengan tugas meneror, menghilangkan dan membunuh, menjebloskan lawan politik ke kamp-kamp konsentrasi, serta berbagai bentuk kekerasan atau intimidasi lain.
3. Ketiga, state-sponsored, yaitu pemerintah berkuasa menyewa teroris non-negara atau pasukan bayaran untuk mendestabilisasi atau mengintimidasi lawan politik atau kelompok oposisi.
4. Keempat, entrepreneurial yang adalah kelompok non-negara maupun tentara bayaran, yang bisa disewa untuk aneka tujuan politik (dan ekonomi) terbatas.

¹⁰ Loudewijk F. Paulus, *Op. cit.*,

Lebih jauh lagi Tb. Ronny Rahman Nitibaskara menjelaskan beragamnya pelaku, sudah barang tentu menimbulkan berbagai corak ragam motif-motif dilancarkannya terorisme. Secara umum motif-motif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Motif Politik Secara umum terorisme mengandung motif politik, demikian kira-kira pandangan klasik mengenai terorisme. Selengkapnya pandangan tersebut sebagai berikut "Terrorism has been defined as the sub-state application of violence or threatened violence intended to show panic in society, to weaken or even overthrow the incumbents, and to bring about political change. It shades on occasion into guerrilla warfare (although unlike guerrillas, terrorists are unable or unwilling to take or hold territory) and even a substitute for war between state". Definisi tersebut tampaknya sesuai dengan kelompok-kelompok organisasi yang merupakan gerakan perlawanan yang sering dituduh melaksanakan terorisme, seperti Liberation Front (FMLN – Salvador). Sedangkan di Eropa, Irish Republican Army (IRA), Euzkadi ta Askatusuna (ETA-Basque, Spanyol) Armenia Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA).
2. Motif Ekonomi Terorisme yang bermotifkan ekonomi, yakni mencari keuntungan secara material sebanyak-banyaknya, biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan (crime

organizations) seperti Mafia, Yakuza, kartel-kartel perdagangan obat terlarang dan sejenisnya.

3. Motif Penyelamatan (salvation) Motif ini bertalian erat dengan ajaran sekte-sekte aliran kepercayaan. Contoh terorisme dengan motif salvation yang paling menggentarkan adalah yang dilakukan oleh sekte Aum Shinrikyo di Jepang pimpinan Shoko Asahara. Kelompok sekte ini pada bulan Maret 1995 melakukan terror dengan gas sarin di stasiun bawah tanah Tokyo yang menewaskan 10 orang dan melukai 5000 orang lainnya. Pelaku terorisme sama sekali tidak menganggap tindakannya sebagai teror. Dalam keyakinan mereka, manusia hidup senantiasa dalam keadaan terpenjara dan sengsara; karena itu diperlukan adanya suatu kematian yang cepat untuk penyelamatan. Pelaksanaan terorisme bertujuan untuk penyelamatan nyawa orang lain sebagai tindakan mulia; jauh dari maksud menakutkan, apalagi menebar rage of terror.
4. Motif Balas Dendam Terorisme dengan motif ini biasanya dilakukan pelaku individual, atau kelompok-kelompok kecil terorganisir maupun organisasi-organisasi kejahatan. Pelaku individual dengan motif balas dendam salah satu contohnya adalah Unabomber. Pelaku yang nama sebenarnya adalah Theodore John Keczynski ini merasa kecewa dengan lembaga riset universitas tertentu yang dirasakannya telah

memperlakukannya secara kurang layak. Selanjutnya, ia merasa terdorong untuk menumpahkan kemarahannya berupa terorisme berantai.

5. Kegilaan (madness) Pelaku dengan motif ini biasanya melakukan terorisme berakar dari adanya penyimpangan psikologis. Teroris dari Spanyol, Carlos, yang sempat merajalela ditahun-tahun 1970- an diduga memiliki motif ini.

Penulis menggunakan konsep Teroris untuk menganalisa motivasi dibalik aksi terorisme pasca penembakan diKantor Majalah Charlie Hebdo. Hal ini terkait dengan dampak dari aksi penembakan diKantor Majalah Charlie Hebdo.

Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang bahwa aksi penembakan diKantor Majalah Charlie Hebdo menimbulkan gesekan antara masyarakat Perancis non-muslim dengan umat muslim di Perancis.

Sebagian oknum masyarakat Perancis menyalahkan umat muslim atas kejadian penembakan diKantor Majalah Charlie Hebdo, bahkan terjadi penyerangan dan pembakaran masjid yang dilakukan oleh beberapa oknum.

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara menjelaskan beragamnya pelaku, sudah barang tentu menimbulkan berbagai corak ragam motif-motif dilancarkannya terorisme. Salah satu motive dari terorisme adalah balas

dendam. Motif ini biasanya dilakukan pelaku individual, atau kelompok-kelompok kecil terorganisir maupun organisasi-organisasi kejahatan.

Dalam hal ini, umat muslim merasa tertekan dan marah ketika terjadi penyerangan dan pembakaran masjid oleh beberapa oknum di Perancis. Rasa tertekan dan marah umat muslim atas perlakuan oknum di Perancis menimbulkan rasa benci dan dendam yang kemudian berujung pada aksi-aksi terorisme lanjutan.

D.2 Konsep Kontra-Terorisme

Konsep kedua yang akan digunakan oleh penulis adalah konsep kontra-terorisme, dimana konsep tersebut akan di gunakan dalam menjelaskan tindakan-tindak pemerintah Perancis. Dalam ensiklopedi terorisme, seperti yang dikutip oleh Dyauddin dalam tulisannya yang berjudul *Hard Approach: Intelejen dan Kontra Terorisme*, Kontra terorisme adalah penggunaan personel dan sumber daya lainnya untuk mendahului (*preempt*), mengganggu (*disrupt*), atau menghancurkan (*destroy*) kemampuan (*capability*) teroris dan jaringan pendukung mereka. (Dyauddin, 2015) Sedangkan dalam *Manual US Army Field* kontra-terorisme didefinisikan sebagai Operasi yang mencakup langkah-langkah ofensif diambil untuk mencegah, menghalangi, mendahului, dan menanggapi terorisme.¹¹

Menurut Jason Rineheart, definisi ini lebih konkret, tetapi memiliki kekuatan dan kelemahan. Pertama, benar menyatakan bahwa kontraterorisme

¹¹ Jason, Rinehart. 2010. *Perspective on Terrorism: Counterterrorism and Counterinsurgency*, diakses pada: 8 Agustus 2015
<http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/122/html>

adalah doktrin all-inclusive termasuk pencegahan, preemption, dan tanggapan, yang akan membutuhkan membawa telanjang semua aspek kekuatan bangsa baik di dalam negeri dan internasional. Kedua, definisi ini mencakup segala sesuatu tetapi pada dasarnya membedakan apa-apa, yang merupakan masalah. Jika doktrin kontraterorisme yang efektif berarti 'apa pun yang kita butuhkan, setiap kali kita membutuhkannya,' maka ini bisa menciptakan masalah dengan mengembangkan strategi kontra efektif, mengalokasikan sumber daya, dan menentukan akuntabilitas - mungkin membuat konsep kontraterorisme agak tak berharga. (Rinehart, 2010)

Menurut Neil C. Livingstone pilihan untuk memberantas dan menekan terorisme dapat dilakukan dengan respon yang terus menerus dari sikap tenang, mengukur pertahanan dan inisiatif diplomatic pada suatu sisi sampai pilihan kekuatan pada akhirnya, dalam hubungan ini, tanggapan yang proaktif terhadap terorisme dapat dibagi menjadi tiga katagori:¹²

1. Represial (tindakan pembalasan) merupakan hukuman bagi tindakan-tindakan ilegal yang tidak mempunyai bentuk perdamaian. Kelebihan strategi ini adalah adanya bukti yang kuat bagi suatu negara untuk memberantas dan memerangi terorisme dan mengghukum kelompok terorisme yang lain melakukan berbagai aksinya. Kekurangannya adalah, akan

¹²Neil C. Livingstone, *Proactive Responses to Terrorism: Reprisal, preemption, and Retribution*, dalam *Grand world Law, Political Terrorism theory, Tactical and Counter Measures*, P 219-225

adanya korban jiwa dan kerusakan terlebih dahulu dikarenakan serangan terrorisme.

2. Preemption (pencegahan) merupakan tindakan mendahului sebelum tindakan dilakukan oleh terroris. Preemption dilakukan bukan karena memberi hukuman seperti represial, namun lebih sebagai tindakan proteksi, pencegahan dari serangan terroris yang menyebabkan kematian dan kehancuran. Kelebihan dari preemption adalah dapat mencegah terjadinya korban jiwa dan kerusakan yang dilakukan oleh kelompok terrorisme dikarenakan sebelum kelompok terrorisme melancarkan serangan sudah dihancurkan terlebih dahulu oleh militer. Kelemahannya adalah, apabila data dan bukti-bukti yang diberikan oleh intelejen kurang akurat maka akan terjadi pembunuhan orang yang tidak berdosa dan kerusakan yang tidak diinginkan.
3. Retribution (balas jasa) atau balas jasa lebih bersifat politis dari aksi-aksi militer. Pada umumnya tindakan politis lebih bersifat lunak, kompromi, dari pada tindakan militer. Kelebihan dari strategi ini adalah, tidak adanya korban jiwa dimana kedua belah pihak dikarenakan tidak adanya serangan yang dilakukan oleh keduanya. Strategi ini lebih mementingkan perdamaian dari pada kekuatan senjata. Kekurangan dari strategi ini adalah akan memakan waktu yang lama dalam penyelesaian

damai tersebut, dan pihak negara harus mau berkompromi dengan pihak teroris.

E. Hipotesa

Dengan menggunakan kerangka teori diatas dalam menjawab rumusan masalah yang ada penulis dapat menarik kesimpulan sementara bahwa Pemerintah Perancis segera mengambil tindakan Kontra Terorisme. Yaitu:

1. Dengan melaksanakan tindakan yang bersifat Preemption (pencegahan), dimana pemerintah Perancis berusaha meningkatkan kualitas kerja badan intelejen, dengan menggelontorkan dana kepada institusi dan badan intelejen anti terorisme.
2. Menerapkan tindakan yang bersifat Retribution (balas jasa) dimana pemerintah Perancis berusaha menjalin baik dengan umat muslim dan menjamin bahwa umat muslim diPerancis tidak bersalah atas aksi teroris manapun.
3. Menerapkan kebijakan yang bersifat Represial (pembalasan), dimana pemerintah Perancis menguatkan regulasi anti terorismenya.

F. Metodologi Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari buku buku ilmiah dan artikel-artikel dalam buku, jurnal, dan artikel-artikel dalam buku, jurnal, dan surat kabar.

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan. Penulis juga memperoleh data yang terpaparkan dari internet yang merupakan isi hasil wawancara dari narasumber terpercaya yaitu Diplomat serta wakil luar negeri yang turut terjun langsung dalam proses pelaksanaan isu konflik yang terjadi di Perancis. Selain itu, data-data yang ada juga didapatkan melalui penelusuran sumber-sumber para ahli dan tokoh politik yang mereka paparkan melalui penulisan buku maupun artikel ataupun jurnal online yang tersedia di Internet.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis membaginya berdasarkan sistematika berikut ini,

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, sistem penulisan.
- BAB II** : Kebijakan pemerintah Perancis dalam menghadapi terrorisme di Perancis sebelum peristiwa penembakan di Kantor Majalah Charlie Hebdo.
- BAB III** : Membahas mengenai latar belakang Charlie Hebdo, peristiwa penyerangan yang terjadi di Kantor Majalah Charlie Hebdo, dan dampak bagi pemerintah Perancis.

BAB IV : Membahas upaya yang diambil pemerintah Perancis dalam memerangi terorisme pasca penyerangan Kantor Majalah Charlie Hebdo, yang terdiri dari:

1. Lebih memaksimalkan kinerja badan intelejen pemerintah Perancis, dalam memerangi terorisme
2. Meningkatkan kerjasama dengan Negara lain dalam bidang terorisme

BAB V : Merupakan kesimpulan dari penjabaran dan analisa yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang ditarik diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat oleh penulis.